

THE INFLUENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' TENURE ON FIRM VALUE WITH SUSTAINABILITY REPORTING DISCLOSURE AS AN INTERVENING VARIABLE

Ita Lestari*¹

*Korespondensi

Manajemen, Ekonomi Bisnis, Universitas Primagraha, Serang, Banten, Indonesia
Email*: ItaLestari@upg.ac.id

Risa Nurdzanah*²

Manajemen, Ekonomi Bisnis, Universitas Primagraha, Serang, Banten, Indonesia

History of Article : received Januari 2026, accepted Februari 2026, published Februari 2026

Abstract - This study was conducted to analyze the relationship between the tenure of the board of commissioners and firm value, utilizing sustainability reporting disclosure as an intervening variable. The research focuses on manufacturing entities within the mining and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange throughout the 2020–2024 period. In this framework, the tenure of the board of commissioners serves as the independent variable, while firm value measured via the Tobin's *Q* ratio acts as the dependent variable, with sustainability disclosure transparency across economic, environmental, and social dimensions functioning as the mediating variable. Through purposive sampling, a sample of 26 manufacturing companies was selected for a five-year observation period, and the collected data were analyzed using path analysis techniques with SPSS 25 software. The empirical findings reveal that the duration of the board of commissioners' tenure has no significant impact on either market value or the quality of sustainability disclosures; however, sustainability disclosure itself demonstrates a significant positive influence on firm value, despite not proving to function as a mediator in this model. This phenomenon suggests that market appreciation is driven more by transparency regarding sustainability issues than by board seniority, implying that these findings may serve as a reference for issuers, investors, and policymakers in Indonesia to strengthen sustainability reporting standards as a vital element of long-term responsible corporate governance.

Keywords: Board Tenure, Firm Value, Sustainability Reporting Disclosure.

Abstrak - Studi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis keterkaitan antara durasi masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan (*firm value*), dengan menempatkan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting disclosure*) sebagai variabel antara (*intervening*). Fokus penelitian diarahkan pada entitas manufaktur di sektor pertambangan serta industri bahan kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2020 hingga 2024. Dalam kerangka penelitian ini, masa jabatan dewan komisaris diposisikan sebagai variabel independen, sementara nilai perusahaan yang diukur melalui rasio *Tobin's Q* bertindak sebagai variabel dependen. Adapun variabel mediasi yang digunakan adalah transparansi pengungkapan keberlanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Melalui metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan manufaktur untuk observasi selama lima tahun. Data yang terkumpul kemudian diuji menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25. Temuan empiris mengungkapkan bahwa lamanya masa jabatan dewan komisaris tidak memberikan dampak signifikan, baik terhadap nilai pasar perusahaan maupun terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan, meskipun variabel ini tidak terbukti menjalankan fungsi mediasi dalam model penelitian. Fenomena ini memberikan petunjuk kuat bahwa apresiasi pasar lebih didorong oleh tingkat transparansi isu-isu keberlanjutan dibandingkan dengan faktor senioritas dewan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi emiten, pelaku investasi, serta pembuat kebijakan di Indonesia untuk senantiasa menguatkan standar pelaporan keberlanjutan sebagai elemen vital dalam penerapan tata kelola organisasi yang bertanggung jawab secara jangka panjang.

Kata kunci: Masa Jabatan Dewan Komisaris, Nilai Perusahaan, *Sustainability Reporting Disclosure*.

PENDAHULUAN

Dinamika dalam lanskap bisnis modern saat ini memaksa setiap organisasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap fluktuasi, baik pada skala internal maupun eksternal. Di tengah tantangan tersebut, integrasi teknologi informasi serta sistem digital yang mumpuni menjadi instrumen krusial dalam memperkuat basis pengambilan keputusan manajerial. Optimalisasi instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mengakselerasi pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Kinerja tersebut pada akhirnya berorientasi pada penciptaan nilai perusahaan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan (Setianingsih et al., 2024). Penilaian atas aktivitas dan kinerja keberlanjutan perusahaan diwujudkan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan ini disusun berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (Apriliani et al., 2024; Febriani, 2025; Irfansyah & Hifni, 2025; Rahma & Aldi, 2020). Tingkat transparansi laporan keberlanjutan ditentukan melalui rasio perbandingan antara jumlah indikator yang disajikan secara aktual oleh perusahaan terhadap parameter standar yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Prosedur ini memungkinkan adanya penilaian objektif mengenai sejauh mana entitas telah mengadopsi kerangka pelaporan internasional dalam mendokumentasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan dua standar GRI, yaitu GRI 2016 dengan 136 indikator untuk periode 2020–2021 dan GRI 2021 dengan 117 indikator untuk periode 2022–2024. *Global Reporting Initiative* (GRI) berfungsi sebagai organisasi nonpemerintah yang memfasilitasi standarisasi global dalam praktik pelaporan keberlanjutan bagi berbagai entitas bisnis. Melalui kerangka kerja yang disediakan, organisasi ini mendorong terciptanya akuntabilitas atas dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Adopsi terhadap standar ini memungkinkan adanya keseragaman parameter dalam mengevaluasi kontribusi entitas terhadap pembangunan berkelanjutan serta pemenuhan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Traxler & Greiling, 2018).

Gambar 1. Grafik Daftar Negara Kawasan Asean yang Ramah Lingkungan



Sumber: Environmental Performance Index

Berdasarkan data *Environmental Performance Index*, posisi Indonesia tercatat masih berada pada level yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Skor sebesar 28,2 yang diperoleh mengindikasikan adanya kendala yang signifikan dalam manajemen kelestarian lingkungan secara nasional. Tantangan ini menjadi kian mendesak seiring dengan ekspansi aktivitas investasi yang masif pada sektor pertambangan serta industri dasar dan kimia, yang secara inheren memiliki risiko dampak lingkungan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menuntut adanya sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola lingkungan yang lebih ketat guna memitigasi dampak

ekologis dari operasional industri tersebut. Sektor ini dikategorikan sebagai *high profile industry* karena memiliki tingkat risiko lingkungan yang tinggi, sehingga praktik keberlanjutan dan peran pengawasan dewan komisaris menjadi semakin krusial (Rany et al., 2020). Regulasi mengenai transparansi keberlanjutan di Indonesia telah ditetapkan melalui Kep-431/BL/2012 yang kemudian dipertegas dengan berlakunya POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Ketentuan ini memberikan mandat bagi emiten serta perusahaan publik untuk mendokumentasikan laporan keberlanjutan, baik sebagai dokumen mandiri maupun sebagai bagian yang terintegrasi dalam laporan tahunan. Kendati payung hukum telah tersedia, tingkat kepatuhan dan kualitas substansi dari pelaporan tersebut secara empiris masih memperlihatkan keberagaman yang signifikan di antara berbagai entitas bisnis. Variasi ini mengindikasikan bahwa setiap perusahaan memiliki pendekatan serta komitmen yang berbeda-beda dalam mengomunikasikan dampak non-keuangan mereka kepada publik.

Penelitian terdahulu mengenai karakteristik dewan komisaris, *sustainability reporting disclosure*, dan nilai perusahaan menunjukkan hasil yang belum konsisten (Qureshi, 2022), menemukan bahwa karakteristik dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan dan nilai perusahaan. Sementara itu Istari (2024) menegaskan peran laporan keberlanjutan sebagai mekanisme mediasi dalam mengeskalisasi nilai pasar perusahaan. Di sisi lain, beberapa studi empiris justru menunjukkan bahwa transparansi mengenai isu keberlanjutan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penilaian entitas di mata investor. Keberadaan hasil penelitian yang kontradiktif ini mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*), terutama mengenai efektivitas *sustainability reporting disclosure* dalam menjalankan fungsi sebagai variabel antara (*intervening*). Inkonsistensi ini menjadi landasan kuat untuk menguji kembali sejauh mana pelaporan non-keuangan mampu menjembatani faktor tata kelola internal dengan apresiasi nilai perusahaan secara menyeluruh.

Hingga saat ini, literatur yang mengevaluasi peran pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai mekanisme mediasi dalam hubungan antara durasi jabatan dewan komisaris dan nilai perusahaan masih ditemukan dalam jumlah yang terbatas, khususnya pada lingkup sektor pertambangan serta industri dasar dan kimia. Kelangkaan studi ini menjadi peluang untuk menguji secara empiris keterkaitan tersebut pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Berdasarkan latar belakang fenomena dan celah penelitian yang telah dipaparkan, fokus permasalahan dalam kajian ini diarahkan pada beberapa poin utama, yaitu: (1) eksistensi pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan; (2) keterkaitan masa jabatan dewan komisaris dengan keluasan pengungkapan keberlanjutan; (3) dampak pengungkapan keberlanjutan terhadap apresiasi nilai perusahaan; serta (4) fungsi pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai variabel antara dalam memediasi pengaruh masa jabatan dewan terhadap nilai entitas secara keseluruhan.

Kajian ini dilaksanakan dengan fokus untuk menguji serta menganalisis keterkaitan antara durasi masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan (*firm value*), serta dampaknya terhadap cakupan pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu, analisis diarahkan untuk membuktikan pengaruh positif pengungkapan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan, serta mengevaluasi efektivitas laporan tersebut dalam menjalankan fungsi mediasi pada hubungan antara masa jabatan dewan komisaris dan nilai entitas. Dalam kerangka penelitian kuantitatif, diperlukan perumusan hipotesis sebagai bentuk jawaban teoretis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Hipotesis ini berperan sebagai proposisi sementara yang diturunkan dari sintesis teori serta kerangka pemikiran logis. Bersifat provisional, hipotesis berfungsi sebagai panduan dalam pengujian empiris untuk memvalidasi apakah teori yang digunakan relevan dengan fenomena data yang diobservasi di lapangan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris terhadap *Firm Value*

Masa jabatan kerja pada dasarnya merupakan cerminan dari akumulasi pengalaman dan tingkat kematangan seseorang dalam suatu organisasi. Secara konseptual, masa jabatan mencerminkan lamanya waktu yang ditempuh individu untuk memahami dinamika tugas sekaligus membuktikan kemampuannya dalam mengeksekusi tanggung jawab tersebut dengan baik (Maulia & Januarti, 2014). Dalam konteks tata kelola perusahaan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui lensa *Resource Dependence Theory*, yang memandang dewan komisaris bukan sekadar pengawas, melainkan penyedia sumber daya strategis yang krusial. Durasi masa jabatan yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi dewan komisaris untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika internal serta operasional perusahaan secara mendalam. Selain penguasaan aspek internal, masa jabatan yang ekstensif juga memfasilitasi pembentukan jaringan eksternal yang lebih solid, terutama dalam menjalin hubungan strategis dengan otoritas regulator serta pemangku kepentingan kunci lainnya. Akumulasi pengalaman dan hubungan institusional ini secara teoretis dipandang sebagai aset intelektual yang dapat memperkuat fungsi pengawasan serta pemberian saran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Kapasitas ini memungkinkan mereka untuk memberikan arahan strategis yang lebih matang dan akses terhadap sumber daya yang sulit dijangkau oleh anggota dewan yang baru (Astari et al., 2016). Ketersediaan sumber daya strategis serta arahan berkualitas yang berasal dari dewan komisaris berpengalaman memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih optimal serta daya saing yang lebih kompetitif. Secara teoretis, kapabilitas dewan ini mengirimkan sinyal positif kepada pelaku pasar, yang kemudian diterjemahkan menjadi peningkatan nilai perusahaan secara menyeluruh. Melalui alur logika tersebut, dapat dibangun sebuah proposisi bahwa stabilitas dan pengalaman dalam struktur pengawasan memiliki korelasi langsung dengan apresiasi pasar. Atas dasar pemikiran tersebut, hipotesis pertama dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Masa jabatan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Firm Value*

Masa Jabatan Dewan Komisaris terhadap *Sustainability Reporting Disclosure*

Masa jabatan dewan komisaris memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan transparansi perusahaan, khususnya terkait isu-isu non-keuangan. Melalui kacamata *Stakeholder Theory*, durasi jabatan dewan komisaris yang lebih ekstensif dipandang memberikan ruang yang lebih besar bagi terciptanya relasi yang solid serta pemahaman mendalam terhadap ekspektasi dari berbagai pihak berkepentingan. Akumulasi waktu dalam posisi pengawasan memfasilitasi dewan untuk mengidentifikasi serta merespons kebutuhan spektrum pemangku kepentingan secara lebih komprehensif, mulai dari pemegang saham hingga komunitas lokal di sekitar area operasional. Kapabilitas dalam menjembatani beragam kepentingan ini secara teoretis mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik transparansi yang lebih luas, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan upaya menjaga legitimasi organisasi di mata publik. Pengalaman yang terakumulasi selama bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan yang paling relevan dengan operasional perusahaan, sehingga mereka lebih cenderung mendorong pengungkapan informasi yang lebih komprehensif. Berdasarkan kerangka *Legitimacy Theory*, transparansi melalui pengungkapan keberlanjutan diposisikan sebagai instrumen strategis yang digunakan organisasi untuk memperoleh pengakuan serta penerimaan dari masyarakat luas. Dewan komisaris dengan masa jabatan yang ekstensif cenderung memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap dinamika tekanan sosial serta eskalasi tuntutan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif ini, pelaporan keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan dipahami sebagai bentuk investasi jangka panjang yang krusial untuk memelihara reputasi korporasi. Selain itu, praktik pengungkapan yang konsisten berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap risiko legitimasi, memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan tetap selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di tengah

publik. Integrasi pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai sosial memungkinkan dewan komisaris untuk menjamin bahwa aktivitas organisasi tetap sinkron dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Keselarasan ini secara teoretis dipandang mampu mendorong peningkatan, baik dari sisi kualitas substansi maupun kuantitas parameter yang disajikan dalam laporan keberlanjutan (Qureshi, 2022). Mekanisme pengawasan yang peka terhadap ekspektasi publik, transparansi informasi non-keuangan menjadi lebih komprehensif, sehingga memperkuat akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Atas dasar pemikiran tersebut, hipotesis pertama dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Masa Jabatan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting Disclosure*

Sustainability Reporting Disclosure terhadap Firm Value

Dalam dinamika pasar modal modern, pengungkapan keberlanjutan telah bertransformasi dari sekadar laporan pelengkap menjadi instrumen strategis yang memengaruhi persepsi pasar. Dalam paradigma bisnis kontemporer, perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang beroperasi secara terisolasi dari lingkungan sosialnya. Fenomena ini tercermin dari kecenderungan investor masa kini yang mulai mengadopsi perspektif jangka panjang dalam pengambilan keputusan investasi. Prioritas dialihkan pada entitas yang tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian profitabilitas finansial, tetapi juga mampu mendemonstrasikan komitmen yang substansial terhadap tanggung jawab sosial serta pelestarian ekologis (Pujiningsih, 2020). Pengintegrasian nilai-nilai non-finansial ini dipandang sebagai indikator resiliensi perusahaan dalam menghadapi risiko masa depan dan memenuhi ekspektasi global terhadap pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma di mana pengungkapan keberlanjutan dianggap sebagai sinyal positif (*signalling theory*) mengenai kesehatan organisasi secara menyeluruh dan kemampuan perusahaan dalam memitigasi risiko non-keuangan di masa depan. Melalui transparansi mengenai aktivitas sosial dan lingkungan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas di mata para pemangku kepentingan. Bagi investor, pengungkapan yang komprehensif mengurangi asimetri informasi dan memberikan jaminan bahwa perusahaan memiliki keberlanjutan operasional demi pembangunan jangka panjang. Eskalasi kepercayaan investor tersebut secara sistematis memicu peningkatan permintaan terhadap instrumen ekuitas perusahaan di pasar modal. Fenomena ini memberikan tekanan positif pada harga saham, yang secara langsung berkontribusi terhadap penguatan nilai perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan alur logika tersebut, dapat ditarik sebuah proposisi mengenai korelasi antara keterbukaan informasi non-keuangan dengan apresiasi pasar. Atas dasar pemikiran ini, hipotesis ketiga dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

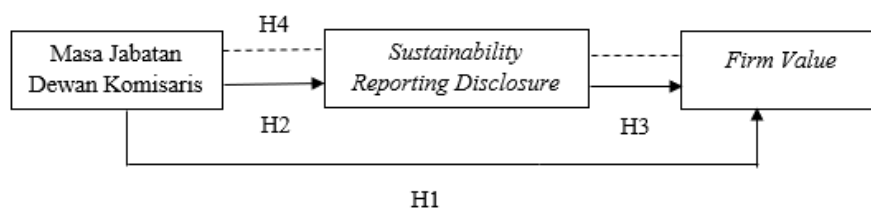
H3: *Sustainability Reporting Disclosure* berpengaruh positif terhadap *Firm Value*

Masa Jabatan Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap *Firm Value* dengan *Sustainability Reporting Disclosure* Sebagai *Intervening*

Durasi masa jabatan dewan komisaris tidak hanya memberikan pengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja finansial organisasi, namun juga memiliki peran strategis melalui mekanisme penguatan transparansi aspek non-keuangan. Akumulasi pengalaman dalam struktur pengawasan tersebut memungkinkan terciptanya sistem pelaporan yang lebih komprehensif, yang kemudian berfungsi sebagai jembatan informasi bagi para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kebijakan dewan terkait keterbukaan informasi keberlanjutan menjadi instrumen perantara yang menghubungkan tata kelola internal dengan persepsi pasar, sehingga mampu mengoptimalkan penilaian entitas secara lebih menyeluruh. Dalam perspektif yang lebih integratif, masa jabatan yang panjang memungkinkan dewan komisaris untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu

strategis dan tanggung jawab etis perusahaan. Dengan pengalaman tersebut, dewan komisaris cenderung lebih proaktif dalam mendorong pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas guna memenuhi ekspektasi publik. Pengungkapan yang transparan ini kemudian menjadi modalitas bagi perusahaan untuk memperkuat posisi mereka di mata investor (Rahayu, 2022). Dengan demikian, pengungkapan keberlanjutan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kompetensi dewan komisaris dengan apresiasi pasar. Ketika dewan komisaris yang berpengalaman berhasil meningkatkan standar pelaporan keberlanjutan perusahaan, hal tersebut akan menurunkan tingkat asimetri informasi dan membangun reputasi positif yang kuat. Respon positif dari pasar terhadap praktik keberlanjutan inilah yang kemudian mengonversi pengalaman dewan menjadi peningkatan nilai perusahaan secara nyata. Atas dasar pemikiran tersebut, hipotesis pertama dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:
H4: Masa Jabatan Dewan komisaris berpengaruh terhadap *Firm Value* melalui *Sustainability Report Disclosure*.

Gambar 2. Model Penelitian



Sumber: Peneliti, 2025

Sintesis dari berbagai tinjauan teoretis dan empiris tersebut mengarahkan pada pengujian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui mekanisme variabel *intervening*. Dalam model ini, masa jabatan dewan komisaris diposisikan sebagai variabel independen, sementara nilai perusahaan yang diprosikan melalui rasio *Tobin's Q* ditetapkan sebagai variabel dependen. Peran pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai variabel *intervening* diukur menggunakan parameter standar GRI 2016 dan GRI 2021. Analisis ini difokuskan pada emiten yang beroperasi di sektor pertambangan serta sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode observasi data yang mencakup tahun 2020 hingga 2024.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam kajian ini mencakup seluruh perusahaan pada sektor pertambangan serta sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2020 hingga 2024. Pemilihan sektor-sektor tersebut didasarkan pada karakteristik operasional yang memiliki keterkaitan erat dengan dampak lingkungan, serta kewajiban konstitusional untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak eksternal. Selain itu, entitas dalam sektor ini terikat oleh mandat regulasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Guna memperoleh sampel yang representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian, digunakan teknik *purposive sampling*. Metode ini diterapkan dengan menetapkan seperangkat kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh setiap anggota populasi agar dapat diinklusikan dalam analisis data. Penggunaan kriteria tersebut memastikan bahwa sampel yang terpilih memiliki konsistensi informasi yang diperlukan untuk menguji model penelitian secara akurat.

Tabel 1. Penentuan kriteria sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1	Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	126

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
2	Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar dan kimia yang tidak secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2024	-17
3	Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar dan kimia yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut turut periode tahun 2020-2024	-12
4	Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar dan kimia yang <i>profitabilitas</i> pada periode tahun 2020-2024 bernilai negative	-39
5	Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar dan kimia menggunakan mata uang Rupiah periode tahun 2020-2024	-32
Jumlah Sampel		26

Sumber: Peneliti, 2025

Melalui prosedur seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan dari sektor pertambangan serta industri dasar dan kimia yang memenuhi persyaratan analisis. Basis data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dari entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2020 hingga 2024. Seluruh informasi yang diolah merupakan data sekunder, yakni data yang telah dipublikasikan oleh perusahaan secara resmi dan diakses melalui sumber dokumentasi otoritas bursa atau situs web resmi masing-masing entitas. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan adanya konsistensi dan transparansi dalam proses verifikasi angka-angka yang merepresentasikan kinerja finansial maupun pengungkapan aspek keberlanjutan.

Variabel dependen yang dianalisis dalam kajian ini adalah nilai perusahaan, yang merupakan representasi dari persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek entitas secara keseluruhan. Pengujian dilakukan secara empiris untuk mengevaluasi pengaruh *sustainability reporting disclosure* terhadap nilai perusahaan, yang diproksikan melalui rasio *Tobin's Q*. Penggunaan proksi ini dipilih karena kemampuannya dalam mencerminkan nilai pasar perusahaan relatif terhadap nilai penggantian asetnya, sehingga memberikan indikasi yang lebih akurat mengenai efektivitas pengelolaan aset intelektual dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Tobin's Q bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Nurhayati, 2019):

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(\text{EMV} + \text{D})}{(\text{EBV} + \text{D})} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Q : nilai perusahaan.

EMV : nilai pasar ekuitas (*closing price* x jumlah saham yang beredar).

D : nilai buku dari total utang.

EBV : nilai buku dari total aktiva

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan (*tenure*) dewan komisaris ditetapkan sebagai variabel independen dalam model penelitian ini. Variabel tersebut merepresentasikan durasi waktu atau masa bakti seorang anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada perusahaan. Secara konseptual, masa jabatan ini dipandang sebagai indikator akumulasi pengalaman, pemahaman mendalam terhadap struktur organisasi, serta kematangan hubungan profesional dengan pemangku kepentingan. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana stabilitas dalam struktur dewan komisaris mampu memengaruhi kebijakan strategis perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap valuasi pasar. Penggunaan *tenure* sebagai proksi didasarkan pada asumsi bahwa masa jabatan yang lebih lama mencerminkan akumulasi

pengetahuan dan pemahaman terhadap kondisi internal perusahaan serta lingkungan bisnis (Ramos & Cahyonowati 2021).

$$\text{Masa Jabatan Dewan Komisaris} = \frac{\text{Pengalaman Dewan Komisaris} > 3 \text{ tahun}}{\text{Total jumlah Dewan Komisaris}} \dots \dots \dots (2)$$

Variabel Perantara (*Intervening*)

Fungsi mediasi dalam kajian ini dijalankan oleh variabel *sustainability reporting disclosure*, yang merefleksikan tingkat transparansi entitas terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Luasnya pengungkapan tersebut dikuantifikasi menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) dengan mengacu pada pedoman standar dari *Global Reporting Initiative* (GRI), khususnya GRI Standards 2016 dan GRI Standards 2021. Guna menjamin konsistensi data lintas periode, dilakukan penyelarasan melalui pemetaan indikator yang memiliki substansi serupa di antara kedua standar tersebut. Proses penilaian indeks menggunakan pendekatan dikotomis, di mana setiap parameter pengungkapan diberikan bobot skor 1 apabila diinformasikan secara jelas dan skor 0 jika sebaliknya. Skor kumulatif dari seluruh parameter kemudian dijumlahkan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas keberlanjutan dari masing-masing entitas secara komprehensif. Perhitungan indeks tanggung jawab sosial perusahaan secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{K}{N} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

SRDI = *Sustainability Report Disclosure Index*

K = Jumlah item yang diungkapkan

N = Jumlah item yang diharapkan diungkapkan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian ini mengandalkan data sekunder yang dihimpun secara sistematis dari laporan keuangan tahunan serta laporan keberlanjutan emiten manufaktur pada sektor pertambangan serta industri dasar dan kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Guna menjamin akurasi dan relevansi data terhadap model analisis, seleksi subjek penelitian dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Pendekatan ini diterapkan dengan menetapkan seperangkat kriteria inklusi yang ketat, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap sampel yang terpilih memiliki kelengkapan informasi yang diperlukan serta mampu merepresentasikan fenomena yang dikaji sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Prosedur analisis deskriptif diterapkan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik distribusi data pada setiap variabel yang dikaji. Melalui pendekatan ini, informasi statistik yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta tingkat sebaran data yang direpresentasikan oleh standar deviasi dapat diidentifikasi secara mendalam. Hasil pengolahan data statistik deskriptif untuk variabel masa jabatan dewan komisaris, pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report disclosure*), dan nilai perusahaan (*firm value*) disajikan secara terperinci dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Median	Max	Mean	Std. Deviation	Kesimpulan
Masa Jabatan	130	0.000	0.500	1.000	0.525	0.336	Berpengalaman lebih dari 3 tahun
<i>Sustainability</i>	130	0.100	0.525	1.000	0.503	0.265	Belum seluruhnya

Variabel	N	Min	Median	Max	Mean	Std. Deviation	Kesimpulan
<i>Report Disclosure</i>							mengungkapkan <i>Sustainability Report Disclosure</i>
<i>Firm Value</i>	130	0.100	0.800	1.500	0.885	0.332	Menunjukkan <i>Firm Value</i> yang Baik

Sumber: SPSS 25, 2025

Analisis terhadap durasi masa bakti dewan komisaris menunjukkan bahwa secara rata-rata, lebih dari separuh anggota dewan telah menjalankan fungsi pengawasan selama minimal tiga tahun pada perusahaan sampel. Kecenderungan ini diperkuat oleh nilai median yang berada di bawah nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa mayoritas dewan komisaris memiliki masa jabatan yang terkonsentrasi pada durasi tiga tahun atau lebih. Selain itu, tingkat variabilitas data yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi ditemukan lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebaran data masa jabatan dewan komisaris berada dalam kategori relatif homogen, yang berarti tidak terdapat fluktuasi atau kesenjangan durasi jabatan yang ekstrem di antara perusahaan-perusahaan yang diobservasi dalam periode penelitian tersebut.

Analisis terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa secara rata-rata, lebih dari separuh perusahaan dalam sampel telah melaksanakan pelaporan aspek keberlanjutan. Namun, posisi nilai median yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan cenderung masih melakukan pengungkapan dalam cakupan yang terbatas sesuai pedoman GRI. Konsistensi data ini didukung oleh nilai standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rata-rata, yang menegaskan bahwa sebaran data berada pada kategori relatif homogen. Fenomena ini mengarah pada kesimpulan bahwa secara umum, entitas dalam sektor ini belum mencapai tingkat transparansi yang utuh dalam laporan keberlanjutannya. Kendati demikian, tetap ditemukan adanya perusahaan tertentu yang telah mendemonstrasikan kepatuhan pelaporan secara komprehensif sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh GRI.

Analisis terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa secara rata-rata, entitas dalam sampel memiliki nilai *firm value* sebesar 0,885. Angka ini merefleksikan bahwa nilai pasar ekuitas dan utang perusahaan setara dengan 0,885 kali nilai buku total aset dan kewajibannya. Posisi nilai median yang ditemukan lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan dalam observasi memiliki nilai pasar yang cenderung berada di atas rata-rata tersebut. Selain itu, sebaran data ini didukung oleh nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata, yang menegaskan bahwa data *firm value* berada dalam kategori relatif homogen. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya disparitas nilai pasar yang ekstrem di antara perusahaan-perusahaan sektor pertambangan serta industri dasar dan kimia selama periode pengamatan.

Hasil Uji Normalitas

Evaluasi terhadap asumsi normalitas dalam penelitian ini diimplementasikan melalui pendekatan *Monte Carlo*. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel secara repetitif yang memungkinkan perolehan estimasi parameter secara tidak bias berdasarkan distribusi data yang sebenarnya. Keunggulan prosedur ini terletak pada kemampuannya dalam memberikan hasil yang lebih akurat dan stabil, terutama ketika menghadapi kompleksitas sebaran data dalam model statistik. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil analisis normalitas disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Keterangan		Pengalaman	<i>Sustainability Reporting Disclosure</i>	<i>Firm Value</i>
One-Sample Monte Carlo Sig.(2-tailed)	Kolmogorov	0.101	0.058	0.051

Sumber: SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel tersebut, dapat diobservasi nilai signifikansi (*Monte Carlo Sig. 2-tailed*) untuk variabel masa jabatan dewan komisaris, pengungkapan laporan keberlanjutan, serta nilai perusahaan. Ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi yang secara konsisten berada di atas ambang batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, model regresi yang dikembangkan dinilai layak dan memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam tahapan analisis statistik selanjutnya, guna memastikan validitas hasil estimasi parameter yang dihasilkan.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan dengan tujuan untuk mendeteksi potensi adanya korelasi linear yang tinggi antar variabel independen di dalam model regresi. Dalam kajian ini, identifikasi multikolinearitas dilakukan melalui analisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model regresi dikategorikan terbebas dari kendala multikolinearitas apabila nilai VIF yang dihasilkan berada di bawah ambang batas 3 (Halim, 2023). Ketentuan batas yang lebih konservatif ini digunakan untuk menjamin bahwa setiap variabel independen memiliki kontribusi yang unik dan tidak redundan, sehingga estimasi koefisien regresi tetap stabil dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Masa Jabatan	0.966	1.036	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Sustainability Reporting Disclosure</i>	0.919	1.088	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: SPSS 25, 2025

Merujuk pada data yang disajikan dalam Tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang secara konsisten berada di bawah angka 3. Temuan ini mengindikasikan ketiadaan korelasi linear yang signifikan atau berlebihan antar variabel independen di dalam model. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak mengalami kendala multikolinearitas. Terpenuhinya kriteria ini menjamin bahwa setiap variabel prediktor memberikan informasi yang independen terhadap variabel dependen, sehingga meminimalisir risiko bias dalam estimasi koefisien regresi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pendekatan analitis yang diterapkan dalam pengolahan data ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode tersebut digunakan guna menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di dalam suatu model persamaan linear. Dalam konteks penelitian ini, pengujian hipotesis difokuskan pada evaluasi pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan (*firm value*). Selain itu, model ini juga mengintegrasikan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting disclosure*) sebagai variabel *intervening* untuk mendeteksi adanya mekanisme mediasi dalam hubungan struktural tersebut. Penggunaan metode ini memungkinkan identifikasi besaran kontribusi masing-masing variabel secara parsial terhadap fluktuasi

nilai perusahaan.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1

Variabel	Koefisien	Sig
(Constant)	0.926	0.000
Masa Jabatan	-0.153	0.070
<i>Sustainability Reporting Disclosure</i>	0.475	0.001

Sumber: SPSS 25, 2025

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2

Variabel	Koefisien	Sig
(Constant)	0.415	0.000
Masa Jabatan	-0.022	0.663

Sumber: SPSS 25, 2025

Merujuk pada hasil estimasi parameter yang tersaji dalam Tabel 5 dan Tabel 6, formulasi persamaan regresi linear dalam penelitian ini dapat disusun untuk menggambarkan hubungan struktural antar variabel. Model ini mencakup persamaan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, serta persamaan untuk menguji pengaruh variabel independen dan mediasi terhadap variabel dependen. Secara matematis, model regresi tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Persamaan regresi model 1:

$$FV = 0.926 - 0.153 \text{ TN} + 0.475 \text{ SRD} \dots \dots \dots (4)$$

Persamaan regresi model 2:

$$\text{SRD} = 0.415 - 0.022 \text{ TN} \dots \dots \dots (5)$$

Berdasarkan hasil pengujian regresi, diperoleh penjelasan yang menggambarkan hubungan antara variabel Masa Jabatan Dewan Komisaris (X1), dan *Sustainability Reporting Disclosure* (Z) yang dapat mempengaruhi *Firm Value* (Y) dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada model regresi 1 menunjukkan nilai yang signifikan yang berarti ketika masa jabatan dan *sustainability reporting disclosure* bernilai 0 maka *firm value* bernilai 0,926.
2. Koefisien regresi masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan bernilai -0,153 namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik dewan komisaris telah menjabat selama 3 tahun ataupun kurang dari itu tidak memberikan dampak apapun kepada *firm value*.
3. Koefisien regresi *sustainability reporting disclosure* terhadap nilai perusahaan sebesar 0,475. Nilai positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yaitu sebesar 0,475 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai konstanta pada model regresi 2 menunjukkan nilai yang signifikan yang berarti ketika masa jabatan bernilai 0 maka *firm value* bernilai 0,415.
5. Koefisien regresi masa jabatan dewan komisaris terhadap *sustainability reporting disclosure* sebesar -0,022 dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik dewan komisaris telah menjabat selama 3 tahun ataupun kurang dari itu tidak memberikan dampak apapun kepada *sustainability reporting disclosure*.

Hasil Koefisien Determinasi (*R Square*)

Analisis koefisien determinasi diterapkan guna mengevaluasi sejauh mana kapasitas variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, yang dinyatakan dalam satuan persentase di dalam model regresi. Dalam kajian ini, parameter koefisien determinasi akan ditelaah melalui dua model estimasi, yaitu model pertama untuk variabel mediasi dan model kedua untuk

variabel dependen. Guna memperoleh estimasi yang lebih akurat dan meminimalisir bias akibat penambahan variabel dalam model, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* sebagai indikator utama. Penggunaan *Adjusted R Square* memberikan gambaran yang lebih konservatif dan kredibel mengenai kekuatan prediktif model terhadap fenomena yang diteliti.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model	Adjusted R Square
Model 1	0,107
Model 2	0,059

Sumber: SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada model pertama, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan angka 0,107 atau 10,7%. Hal ini merefleksikan bahwa masa jabatan dewan komisaris dan *sustainability reporting disclosure* mampu menjelaskan fluktuasi *firm value* sebesar 10,7%. Adapun porsi dominan sebesar 89,3% diterangkan oleh variabel-variabel eksternal lainnya yang tidak diinklusi dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada model kedua, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,059 atau 5,9%. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel masa jabatan dewan komisaris memiliki kapasitas sebesar 5,9% dalam menjelaskan variasi *sustainability reporting disclosure*. Sementara itu, mayoritas proporsi sebesar 94,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model ini.

Uji F

Uji F diterapkan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi kelayakan (*goodness of fit*) dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Melalui pengujian ini, dapat diidentifikasi apakah seluruh variabel independen yang diestimasi dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Terpenuhinya kriteria pada uji ini menjadi syarat krusial untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan bersifat representatif untuk digunakan dalam melakukan prediksi atau penarikan kesimpulan ilmiah. Hasil pengolahan data untuk uji kelayakan model tersebut disajikan secara terperinci dalam tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji F Model 1

Model	Nilai Signifikansi
Model 1	0,001
Model 2	0,014

Sumber: SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang tertera pada tabel tersebut, model regresi pertama menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Mengingat angka tersebut jauh di bawah ambang batas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pertama memenuhi kriteria kelayakan model (*goodness of fit*) untuk digunakan dalam analisis. Hal serupa ditemukan pada model regresi kedua yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014. Karena nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, maka model regresi kedua juga diindikasikan layak dan kredibel untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Dengan terpenuhinya uji kelayakan pada kedua model tersebut, maka prosedur analisis dapat dilanjutkan ke tahap pengujian parameter secara parsial.

Hasil Uji t

Uji t diterapkan dengan tujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen di dalam model. Melalui prosedur ini, dapat diidentifikasi sejauh mana kontribusi unik dari tiap variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat secara mandiri. Dalam melakukan pengujian hipotesis tersebut, ditetapkan tingkat

signifikansi sebesar 5% sebagai ambang batas pengambilan keputusan statistik. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih rendah dari ambang batas tersebut, maka variabel independen secara individual dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil estimasi parameter melalui uji t disajikan secara terperinci dalam tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji t Model 1

Variabel	Koefisien	Signifikansi
Kontanta	0,926	0,000
Masa Jabatan	-0,159	0,070
<i>Sustainability Reporting Disclosure</i>	0,475	0,001

Tabel 10. Hasil Uji t Model 2

Variabel	Koefisien	Signifikansi
Kontanta	0,415	0,000
Masa Jabatan	-0,022	0,663

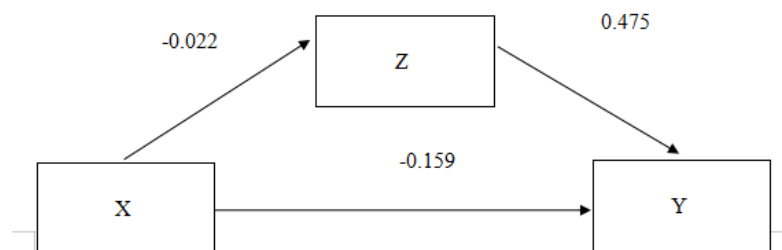
Berdasarkan hasil pengujian parsial yang tertera pada tabel tersebut, variabel masa jabatan dewan komisaris menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,070 dalam hubungannya terhadap *firm value*. Mengingat nilai tersebut melampaui ambang batas signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka hipotesis nol (H01) diterima dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa masa jabatan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya, hasil estimasi terhadap variabel masa jabatan dewan komisaris terhadap *sustainability reporting disclosure* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,663. Dengan nilai yang lebih besar dari 0,05, maka H02 diterima dan H2 ditolak, yang berarti durasi masa bakti dewan komisaris tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Sebaliknya, variabel *sustainability reporting disclosure* mencatatkan nilai signifikansi sebesar 0,001 terhadap *firm value*. Karena nilai tersebut jauh di bawah ambang batas 0,05, maka H03 ditolak dan H3 diterima. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa pasar memberikan apresiasi lebih tinggi terhadap entitas yang memiliki transparansi keberlanjutan yang baik.

Analisis Jalur atau *Path Analysis*

Gambar 3. Efek Mediasi Masa Jabatan Dewan komisaris terhadap *Firm Value* dengan *Sustainability Reporting Disclosure* sebagai *intervening*



Sumber: Peneliti, 2025

Keseluruhan hubungan yang telah diuji membentuk sebuah model analisis jalur (*path analysis*) yang terintegrasi. Dalam struktur ini, variabel *Sustainability Reporting Disclosure* diposisikan sebagai

mediator (variabel *intervening*) yang menjembatani hubungan antara masa jabatan dewan komisaris dengan nilai perusahaan (*firm value*). Pendekatan analisis jalur ini digunakan untuk membedah tidak hanya pengaruh langsung (*direct effect*) dari masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi adanya pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) melalui tingkat transparansi laporan keberlanjutan. Dengan demikian, model ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme bagaimana tata kelola dewan komisaris dapat tereskalasi menjadi nilai pasar bagi perusahaan.

1. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Untuk menghitung pengaruh langsung, digunakan formula sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel Masa jabatan Dewan komisaris terhadap *Firm Value* (koefisien a)

$$X \longrightarrow Z = -0.022$$
- b. Pengaruh variabel *Sustainability Reporting Disclosure* terhadap *Firm Value* (koefisien b)

$$Z \longrightarrow Y = 0.475$$
- c. Pengaruh variabel Masa jabatan Dewan komisaris terhadap *Firm Value* (koefisien c)

$$X \longrightarrow Y = -0.159$$

2. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) koefisien ab

Pengaruh variabel Masa jabatan Dewan komisaris terhadap *Firm Value* melalui *Sustainability Reporting Disclosure*

$$X \longrightarrow Z \longrightarrow Y = (-0.022 \times 0.475) = -0.010$$

Berdasarkan hasil analisis jalur yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien pengaruh langsung (*direct effect*) sebesar -0,159. Sementara itu, nilai koefisien pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) yang merupakan hasil perkalian antara jalur (masa jabatan terhadap SRDI) dan jalur (SRDI terhadap *firm value*) adalah sebesar -0,010. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam model yang diuji, pengaruh tidak langsung memiliki proporsi yang lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh langsungnya. Guna mengonfirmasi signifikansi statistik dari pengaruh tidak langsung masa jabatan dewan komisaris terhadap *firm value* melalui *sustainability reporting disclosure*, dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan *Sobel test*. Penggunaan strategi koefisien melalui uji Sobel ini dipilih karena dinilai memiliki kekuatan statistik (*statistical power*) yang lebih unggul dibandingkan dengan metode formal lainnya, termasuk pendekatan langkah-langkah Baron dan Kenny. Prosedur ini memungkinkan penelitian untuk memvalidasi secara presisi apakah variabel mediator berfungsi secara signifikan dalam menjembatani hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil perhitungan uji Sobel secara komprehensif disajikan sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2} \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

- a : koefisien *direct effect* masa jabatan dewan komisaris terhadap *firm value*
 b : koefisien *direct effect* *Sustainability Reporting Disclosure* terhadap *firm value*
 Sa : Standar error dari koefisien a
 Sb : Standar error dari koefisien b

Berdasarkan kalkulasi menggunakan prosedur uji Sobel, diperoleh nilai statistik sebesar 0,025. Nilai ini merupakan indikator krusial dalam menentukan signifikansi pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediator. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung yang dihasilkan dari estimasi standar error koefisien ab. Secara matematis, formulasi yang digunakan untuk menguji signifikansi efek mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$T \text{ hitung} = \frac{ab}{sab} \dots\dots\dots (7)$$

Perhitungan t hitung tersebut didapatkan nilai -0,418. Dari hasil perhitungan *sobel test* di atas mendapatkan nilai t tabel sebesar -1.18, karena nilai t hitung yang diperoleh sebesar -0.418 lebih kecil dari 1.96 dengan tingkat signifikansi 0.05. Temuan ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan (*firm value*) melalui pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting disclosure*). Dengan demikian, variabel *sustainability reporting disclosure* dalam model ini tidak terbukti menjalankan fungsi mediasi dalam hubungan antara durasi jabatan dewan komisaris dan nilai pasar perusahaan.

Penerapan analisis jalur (*path analysis*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran pengaruh langsung maupun tidak langsung dari masa jabatan (*tenure*) dewan komisaris terhadap nilai perusahaan (*firm value*) dengan menempatkan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting disclosure*) sebagai variabel *intervening*. Secara teoretis, pengujian mediasi bersandar pada prasyarat kausalitas yang mengharuskan adanya hubungan signifikan antara variabel independen dan variabel mediator. Namun, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa koefisien pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan tidak mencapai ambang batas signifikansi statistik. Temuan ini menegaskan bahwa variabel independen tidak memiliki kontribusi yang bermakna dalam memprediksi fluktuasi variabel mediator di dalam model ini.

Konsekuensi dari ketidaksignifikanan hubungan antara variabel independen dan variabel mediator adalah tidak terpenuhinya prasyarat utama dalam mekanisme mediasi. Oleh karena itu, pengaruh tidak langsung masa jabatan dewan komisaris terhadap *firm value* melalui *sustainability reporting disclosure* menjadi tidak relevan untuk diinterpretasikan lebih lanjut, meskipun prosedur uji Sobel telah diimplementasikan. Temuan ini menegaskan bahwa *sustainability reporting disclosure* tidak menjalankan fungsi sebagai variabel mediasi dalam kerangka hubungan tersebut.

Secara substansial, fenomena ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara masa jabatan dewan komisaris dan nilai perusahaan hanya dapat ditelaah melalui jalur pengaruh langsung, tanpa melibatkan mekanisme mediasi dari transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan hasil analisis jalur yang komprehensif, hipotesis yang menyatakan bahwa masa jabatan dewan komisaris berpengaruh terhadap *firm value* melalui *sustainability reporting disclosure* secara resmi dinyatakan ditolak. Kegagalan dukungan terhadap hipotesis ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria dasar mediasi, yakni ketiadaan pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel mediator.

Pengaruh Masa Jabatan terhadap *Sustainability Reporting Disclosure*

Ketidaksignifikanan pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan keberlanjutan menunjukkan bahwa lamanya waktu menjabat bukan merupakan faktor tunggal yang menentukan kualitas transparansi non-keuangan perusahaan. Berdasarkan *Legitimacy Theory* dan *Stakeholder Theory*, meskipun dewan dengan masa jabatan lama memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami kebutuhan pemangku kepentingan, hal ini tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan pengungkapan. Fenomena ini dapat terjadi karena kebijakan pengungkapan keberlanjutan di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi wajib (*mandatory*) dari otoritas terkait daripada inisiatif strategis individu anggota dewan. Akibatnya, baik komisaris baru maupun lama cenderung hanya mengikuti standar minimum yang diwajibkan oleh aturan, sehingga peran pengalaman dalam memahami tugas-tugas pekerjaan (Maulia & Januarti, 2014) tidak menciptakan perbedaan yang nyata pada tingkat pengungkapan.

Selain itu, masa jabatan yang lama dapat menimbulkan perspektif yang kaku dan cenderung mempertahankan status quo. Meskipun dewan senior memiliki akses terhadap sumber daya strategis

(Astari et al., 2016), mereka mungkin lebih berfokus pada stabilitas operasional dan kinerja keuangan jangka pendek daripada mengadopsi tren pelaporan keberlanjutan yang bersifat dinamis. Dalam situasi ini, tekanan sosial yang seharusnya direspons melalui pengungkapan keberlanjutan mungkin dianggap kurang material oleh dewan yang telah menjabat lama, atau sebaliknya, dewan baru justru lebih progresif dalam merespons isu-isu lingkungan terbaru demi mendapatkan legitimasi awal. Hal inilah yang menyebabkan masa jabatan secara statistik tidak mampu menjadi prediktor yang kuat bagi luasnya pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Pengaruh *Sustainability Reporting Disclosure* terhadap *Firm Value*

Pengaruh positif pengungkapan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan menegaskan bahwa transparansi informasi non-keuangan kini menjadi salah satu determinan utama dalam penilaian pasar. Berdasarkan pandangan Pujiningsih (2020), investor saat ini telah mengalami pergeseran orientasi, di mana mereka tidak lagi hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi lebih memilih perusahaan yang secara nyata menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif berfungsi sebagai sinyal positif yang mereduksi asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar. Ketika perusahaan secara terbuka memaparkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, hal ini membangun kredibilitas dan kepercayaan investor, yang kemudian direspons melalui peningkatan harga saham sebagai cerminan dari naiknya nilai perusahaan.

Dari perspektif *Legitimacy Theory*, hasil positif ini membuktikan bahwa pengungkapan keberlanjutan efektif dalam menciptakan harmoni antara nilai-nilai perusahaan dengan norma sosial di masyarakat. Perusahaan yang dianggap memiliki legitimasi sosial tinggi cenderung memiliki risiko litigasi dan boikot yang lebih rendah, sehingga memberikan rasa aman bagi investor dalam menanamkan modalnya. Keberhasilan pengungkapan dalam meningkatkan nilai perusahaan ini menunjukkan bahwa pasar memberikan apresiasi terhadap entitas yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi. Dengan demikian, pengungkapan keberlanjutan bukan lagi sekadar pelaporan sukarela, melainkan alat strategis yang mampu mengonversi tanggung jawab moral menjadi keunggulan kompetitif dan peningkatan kemakmuran bagi para pemegang saham.

Pengaruh Masa Jabatan terhadap *Firm Value*

Ketidaksignifikanan pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang kritis yang menyeimbangkan teori-teori sebelumnya. Meskipun secara teoretis *Resource Dependence Theory* menyatakan bahwa masa jabatan lama dapat menyediakan sumber daya strategis (Astari et al., 2016), dalam praktiknya, masa jabatan yang terlalu panjang sering kali memicu fenomena kekakuan organisasi atau *entrenchment effect*. Ketika dewan komisaris menjabat terlalu lama, mereka cenderung kehilangan objektivitas dan independensinya karena hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen, sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya meningkatkan nilai perusahaan justru menjadi kurang efektif (Maulia & Januarti, 2014).

Lebih lanjut, dari perspektif pasar, investor mungkin tidak lagi melihat durasi jabatan sebagai indikator utama kompetensi. Walaupun individu tersebut dianggap telah memahami tugasnya dengan baik (Maulia & Januarti, 2014), dinamika bisnis yang berubah cepat menuntut inovasi yang sering kali justru dibawa oleh tenaga baru dengan perspektif segar. Investor lebih cenderung merespons keahlian spesifik atau adaptabilitas dewan terhadap isu terkini daripada sekadar lama waktu menjabat. Oleh karena itu, kontribusi dewan komisaris dalam meningkatkan nilai perusahaan mungkin lebih ditentukan oleh kualitas keputusan strategis secara kolektif daripada akumulasi waktu individu di dalam dewan, sehingga hubungan langsung antara masa jabatan dan nilai perusahaan menjadi tidak terdeteksi dalam pengujian empiris.

Pengaruh Masa Jabatan terhadap *Firm Value* Melalui *Sustainability Reporting Disclosure*

Ketidakmampuan pengungkapan keberlanjutan dalam memediasi pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan dapat mengindikasikan adanya diskoneksi antara kuantitas pelaporan dengan persepsi kualitas di mata investor. Berdasarkan *Legitimacy Theory* dan *Stakeholder Theory*, dewan komisaris dengan masa jabatan lama memang memiliki kapasitas untuk memahami tekanan sosial dan meningkatkan pengungkapan keberlanjutan demi memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Namun, jika pengungkapan tersebut hanya dipandang oleh pasar sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau bersifat *greenwashing* (sekadar pencitraan), maka peningkatan transparansi tersebut tidak akan mampu dikonversi menjadi peningkatan nilai perusahaan (Pujiningsih, 2020).

Dalam kondisi ini, argumen Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa masa jabatan lama akan meningkatkan nilai melalui keberlanjutan mungkin tidak terpenuhi karena adanya faktor asimetri informasi yang persisten. Meskipun dewan komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai lama waktu jabatannya (Maulia & Januarti, 2014), pasar mungkin lebih memprioritaskan indikator kinerja keuangan jangka pendek dibandingkan informasi keberlanjutan yang dianggap belum memiliki dampak material langsung. Akibatnya, pengungkapan keberlanjutan gagal menjadi jembatan (*intervening*) karena investor tidak melihat adanya korelasi kuat antara laporan tersebut dengan potensi keuntungan masa depan, sehingga peran dewan komisaris dalam menyediakan sumber daya strategis (Astari et al., 2016) lebih langsung berdampak pada aspek operasional daripada melalui jalur pelaporan keberlanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan dengan menguji peran mediasi *sustainability reporting disclosure*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa durasi masa jabatan dewan komisaris tidak menjadi determinan utama dalam mengeskalisasi transparansi laporan keberlanjutan maupun nilai pasar perusahaan pada sektor pertambangan serta industri dasar dan kimia. Temuan ini mengimplikasikan bahwa lamanya masa bakti dewan tidak secara linier meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap praktik pelaporan keberlanjutan. Sebaliknya, pengungkapan laporan keberlanjutan terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma di kalangan investor yang cenderung lebih merespons keterbukaan informasi mengenai praktik lingkungan dan sosial dibandingkan stabilitas struktural dalam dewan komisaris. Secara substansial, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas informasi non-keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan memiliki nilai relevansi pasar yang lebih kuat dalam memengaruhi persepsi pemegang saham.

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk meninjau kembali regulasi terkait batasan masa jabatan dewan komisaris sebagai upaya preventif dalam menjaga independensi serta meminimalkan risiko *entrenchment effect* (efek bercokolnya kekuasaan). Kedua, bagi pihak emiten, pemilihan anggota dewan komisaris hendaknya diprioritaskan pada penguasaan kompetensi *Environmental, Social, and Governance* (ESG), alih-alih hanya menitikberatkan pada aspek senioritas atau durasi jabatan. Terakhir, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan karakteristik dewan dengan mengintegrasikan variabel berbasis kompetensi ESG secara spesifik serta memperpanjang periode pengamatan guna memperoleh tren data yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, L., Kadir, K., & Hifni, S. (2024). Sustainability Accounting: Nilai Perusahaan Dan Carbon Emission Disclosure. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 91–102.
- Astari, K., Zaitul, & Rifa, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Badan usaha Milik Negara (BUMN) di Indonseia. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(1), 1–15.
- Febriani, N. (2025). Analisis Pengaruh Peringkat Asia Sustainability Reporting Rating, Corporate Risk, Firm Size dan Profitabilitas terhadap Risiko Investasi Saham. *Keizai*, 6(1), 35–52.
- Halim, J. J. (2023). Pengaruh Fasilitas dan Harga terhadap Kepuasan Pengunjung (Study Kasus pada Camp Kobes). *Keizai*, 4(1), 44–51.
- Irfansyah, M. E., & Hifni, S. (2025). Pengaruh Pengungkapan Elemen-Elemen Integrated Reporting terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022. *Keizai*, 6(1), 53–79.
- Istan, M. (2024). The Impact of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Corporate Value : The Moderating Role of Financial Performance. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(2), 202–220. <https://doi.org/10.33168/JLISS.2024.0213>
- Maulia, S. T., & Januarti, I. (2014). Pengaruh usia, Pengalaman, dan Pendidikan Dewan komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Go Public Tahun. *Dipenogoro Journal of Accounting*, 3, 1–8.
- Nurhayati, T. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (8).
- Pujiningsih, V. D. (2020). Pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 579–594.
- Qureshi, Z. (2022). Technology and the Future of Growth: Challenges of Change. *International Journal of Strategic Research in Education, Technology and Humanities*, 10(1), 122–125. <https://doi.org/10.48028/iiprds/ijrsreth.v10.i1.12>
- Rahayu, S. (2022). Work experience and special skill in growing employee work effectiveness at PT Deli steel. *International Journal For Innovative Research In Multidisciplinary Field*, 8(4), 234–238.
- Rahma, A. A., & Aldi, F. (2020). The Importance of Commissioners Board Diversity in CSR Disclosure. *International Journal of Economics Development Research*, 1(2), 136–149.
- Ramos, J., & Cahyonowati, N. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Terhadap Pengungkapan Risiko. *Dipenogoro Journal of Accounting*, 11, 1–15.
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh BAPPENAS. *JIEP*, 20(1).
- Setianingsih, R., Hidayah, N., Thoha, M., & Najib, A. (2024). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PERIODE 2021-2023. *JURNAL AKUNTANSI*, 13(2).
- Traxler, A. A., & Greiling, D. (2018). Sustainable public value reporting of electric utilities. *Sustainable Public Value Reporting*, 14(1), 103–121. <https://doi.org/10.1108/BJM-10-2017-0337>